



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUHAMMAD FAHMI**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **247954**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.971.177.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 591.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 996.681.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 51 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 383.296.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 255.550.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
4. MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. MOTOR, HONDA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.650.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 12.600.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 1.299.373.054

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 3.538.700.054



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.538.700.054

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.